

**LAPORAN UJI PETIK TRIWULAN I
PERIODE JANUARI S/D MARET 2019**



**Realisasi dan Kualitas Infrastruktur BDI 2018 dan Kesiapan
Perencanaan Kegiatan BPM 2019**



A. Pendahuluan

Kegiatan pelaksanaan Program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) tahun anggaran 2018 selama periode triwulan I berjalan masih pada penyelesaian kegiatan infrastruktur, LPJ kegiatan dan penyiapan administrasi pendukung audit KAP dan BPKP. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur BDI 2018 mengalami keterlambatan dari target yang ditentukan yaitu 31 Januari 2019 harus sudah selesai 100%, tapi sampai dengan minggu ke 3 Maret baru bisa diselesaikan. Hal ini dikarenakan beberapa kendala teknis maupun non teknis yang membutuhkan proses penyelesaian yang cukup lama. Untuk penghitungan capaian pengurangan kumuh dan KPI khususnya terkait dengan target 2018 sudah disepakati bersama-sama dengan Pemda dan dituangkan dalam Berita Acara Penyepakatan pada tanggal 11 Januari 2019. Hasil capaian KPI untuk kegiatan BDI maupun Kolaborasi sampai dengan 2018 secara umum tercapai, akan tetapi untuk pengukuran indikator "kawasan kumuh yang terfasilitasi" sampai dengan laporan ini dibuat masih belum memenuhi targetnya hal ini disebabkan karena ada beberapa data kegiatan baik BDI / Non BDI masih belum lengkap dan ada beberapa kegiatan kolaborasi yang dilaksanakan di luar lokasi deliniasi kumuh.

Pelaksanaan kegiatan Kotaku di tingkat Kota berbasis Master Schedule dan time line atau rencana kerja OSP 11 KMW Papua, masih pada tahap keberlanjutan kegiatan 2018 yang masih berproses sampai sekarang. Tahap persiapan dan perencanaan kegiatan 2019 sudah mulai berproses pada penyelesaian perencanaan kegiatan (DED, site plan, dll), proposal dan penyiapan berkas pencairan BPM 2019. (masih menunggu kepastian alokasi DIPA)

Lokasi deliniasi kumuh sudah ditetapkan melalui SK Kumuh No. 115 Tahun 2015 dengan total luasan kumuh 100,7Ha di 11 Kelurahan. Dan telah dilakukan up date SK kumuh ditahun 2018 dengan total luasan menjadi 73,97Ha di 10 Kelurahan. Pokja PKP Kota terdiri dari unsur-unsur seperti SKPD/OPD, Akademisi, BUMN, LSM, dan perwakilan BKM/LKM aktif berjalan, sedangkan POKJA ditingkatkan provinsi sudah terbentuk namun masih kurang berfungsi.

Beberapa dukungan teknis yang diberikan oleh OSP-11 agar program bisa berjalan dengan lancar diantaranya adalah pengendalian realisasi dari ketersediaan DIPA PKP dan DIPA PIP. Ditahun 2019 masih menggunakan DIPA PKP awal/ori dan sampai dengan laporan ini dibuat masih menunggu proses refisi DIPA PKP. Dari realisasi DIPA 2018 sudah 100% dilaporkan pada aplikasi Emon. DIPA PIP Kota 2019 untuk sementara yang tersedia hanya Rp. 2.100.000.000 yang akan dioptimalkan dulu pencairannya BPM 2019 tahap I di dua Kelurahan.

Dukungan teknis lainnya adalah pengelolaan Personel, Selain mengelola personel di tingkat OSP, OSP-11 juga melakukan supervisi dan pendampingan terhadap tim korkot dan tim Faskel. Pengelolaan personil yang dilaksanakan selama triwulan I 2019 adalah pelaksanaan assesment fasilitator untuk kontrak baru periode Maret s/d Desember 2019 dan Melakukan evaluasi kinerja terhadap tim Korkot serta memberikan rekomendasi kepada Satker PKP Provinsi Papua untuk susunan personil Korkot dan tim Faskel 2019.

Pelaksanaan pengelolaan data SIM sampai Selama triwulan I 2019 masih pada tahap opname data 2015 s/d 2018 terkait dengan kelengkapan dan keakuratan datanya. KMW Papua mengelola data SIM untuk 1 Kota saja yang di kawal oleh 1 orang Asmandat. Pantauan kelengkapan data SIM dibagi menjadi 4 tahapan yaitu persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Berdasarkan panataun selama Januari s/d Februari 2019 pengelolaan SIM sudah cukup baik, dari sisi kelengkapan sudah 95% sesuai dengan progress yang ada dilapangan. Hanya saja kualitas data yang harus dibenahi kembali dan administrasi pendukung masih banyak yang belum di upload.

1. Tujuan

Tujuan umum kegiatan uji petik pada triwulan I tahun 2019 ini adalah diketahuinya kualitas pengelolaan BDI 2018 dan pemanfaatannya serta proses dan kesiapan perencanaan kegiatan BPM 2019.

2. Keluaran

Keluaran khusus yang diharapkan dari pelaksanaan uji petik adalah mengukur :

- Kualitas input-proses dalam pelaksanaan pemanfaatan BDI 2018
- Kualitas dukungan administrasi dan pembukuan dalam pemanfaatan BDI 2018
- Kualitas infrastruktur yang dibangun dan pemenuhan terhadap standar
- Kesiapan dokumen teknis kegiatan BPM 2019
- Kesiapan KSM kegiatan BPM 2019
- Kesiapan lokasi kegiatan BPM 2019

B. Lokasi uji petik triwulan I 2019 periode Januari s/d Maret 2019

Kegiatan uji petik triwulan I ini kami laksanakan di minggu ke tiga bulan Maret, kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan mengambil sampel 4 kelurahan dari 9 kelurahan yang mendapatkan BDI 2018 dan semuanya adalah calon lokasi penerima BPM 2019 serta 3 Kelurahan lokasi pencegahan. Kegiatan uji petik ini tidak masuk dalam kontrak manajemen OSP 11 sehingga kegiatan kami laksanakan secara mandiri dan dilaksanakan secara bersamaan dengan tim Korkot. Adapun detail pelaksanaannya adalah sebagai berikut;

Tabel-1. Realisasi Pelaksanaan Uji Petik periode Triwulan I tahun 2019

No.	Kelurahan	Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan	Jam (Wit)	Pelaksana	Unsur Terlibat
Kelurahan Kumuh					
1	Bhayangkara	Selasa, 19 Maret 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	PPK Kota/Perwakilan Pemda, Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
2	Mandala	Selasa, 19 Maret 2019	14.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	PPK Kota/Perwakilan Pemda, Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
3	Imbi	Rabu, 20 Maret 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	PPK Kota/Perwakilan Pemda, Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
4	Hamadi	Rabu, 20 Maret 2019	14.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	PPK Kota/Perwakilan Pemda, Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
Kelurahan Non Kumuh					
1	Kelurahan waena	Kamis, 21 Maret 2019	10.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
2	Asano	Kamis, 21 Maret 2019	13.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel
3	Yabansai	Kamis, 21 Maret 2019	15.00 WIT	OSP 11 KMW Papua	Aparat Kelurahan, LKM, KSM, UPL, Tim Faskel

Tabel-2. Realisasi Dari target Pelaksanaan Uji Petik tahun 2019 OSP 11

NO	MONITORING OSP PADA LEVEL KOTA	PELAKSANA	JML. KOTA/KELURAHAN	TARGET	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4	Q-1	Q-2	Q-3	Q-4
					RENCANA 2019				REALISASI 2019			
LEVEL KOTA												
1	KOTA KUMUH INFRA SKALA KOTA	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	1	1	1	1	1	1	1			
LEVEL KELURAHAN												
1	KELURAHAN KUMUH DI KOTA SKALA KOTA	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	5	1	2	3	4	5	3			
2	KELURAHAN NON KUMUH	TA UP, TA INFRA, TA FIC, TA MONEV	34	3	3	4	4	5	3			
LEVEL KELURAHAN												
1	KELURAHAN KUMUH DI KOTA SKALA KOTA	KORKOT,ASKOT INFRA,ASKOT MK,ASKOT FIC, ASKOT UP	5	1	3	5	5	5	3			
2	KELURAHAN NON KUMUH	KORKOT,ASKOT INFRA,ASKOT MK,ASKOT FIC, ASKOT UP	34	3	4	4	4	5	4			

C. Review Capaian Pelaksanaan Kegiatan KOTAKU Provinsi Papua

Gambaran umum hasil uji petik

Berdasarkan hasil analisa kegiatan monitoring (uji petik) yang telah dilaksanakan oleh OSP 11 Provinsi Papua yang mencakup aspek pengelolaan dampak lingkungan dan social, kualitas infrastruktur terbangun dan proses persiapan kegiatan BPM 2019, maka secara keseluruhan terdapat beberapa hal penting yang harus segera ditindaklanjuti pada semua aspek diantaranya :

NO.	TOPIK	CAPAIAN KUANTITATIF	ISU/CATATAN LAPANGAN	FAKTOR PENYEBAB	REKOMENDASI
1.	Kegiatan Kelembagaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pada umumnya kegiatan kelembagaan berjalan cukup baik, semua kegiatan PKM2018 sudah terlaksana sampai dengan laporan pertanggung jawabannya. Sedangkan PKM 2019 belum bisa dilaksanakan masih proses pencairan dana PKM dari DIPA PKP Provinsi. ✓ Semua LKM sudah melaksanakan audit tahunan dengan hasil yang baik, penilaian kinerja BKM sudah dilakukan pada semester ke 2 dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak semua anggota LKM aktif, hal ini dikarenakan kenggotaan LKM labih didominasi olah 1 atau 2 orang saja dan setiap kegiatan-kegiatan rutin LKM kurang melibatkan anggota yang lain ✓ Kemungkinan besar terjadi karena kesibukan masing-masing anggota LKM sehingga sulit bertemu dala satu waktu ✓ Kualitas tim pendamping dalam memandirikan LKM yang masih lemah karena pendamping lebih focus pada proses kegiatan fisik ✓ Forum kolaborasi belum memiliki jadwal dan rencana kerja yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan review kenaggotaan BKM selambat-lambatnya sebelum BPM 2019 cair kerekening BKM ✓ Mengoptimalkan kegiatan KBIK ditingkat kelurahan untuk peningkatan kapasitas ✓ Menindaklanjuti anggota LKM yang terindikasi mencalonkan sebagai anggota dewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ✓ Coaching atau KBIK bersama forum kolaborasi untuk membahas strategi kolaborasi dimasing-masing kelurahan dengan

			<p>status akhir mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keaktifan anggota LKM secara umum masih belum semua aktif, ini merata terjadi hampir disemua LKM dan dalam hal pengadministrasian masih banyak bergantung pada pendamping. ✓ Forum kolaborasi sudah terbentuk hanya belum berjalan sesuai yang diharapkan ✓ Ada beberapa anggota LKM yang terindikasi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. 		<p>out put yang diharapkan adalah adanya rencana kerja yang terukur.</p>
2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	cukup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nomor PIM (Pengelolaan Informasi dan Masalah) tersosialisasi kepada masyarakat melalui papan proyek/papan informasi ✓ Masih terdapat LKM yang tidak memiliki kotak maupun buku pengaduan ✓ Masyarakat maupun pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kesadaran tim pendamping dan masyarakat dalam mendokumentasikan informasi dan permasalahan yang ada masih angat kurang ✓ Sosialisasi teknis penyampaian informasi dan masalah belum dilakukan secara menerus 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Manfaatkan momen pelaksanaan PKM untuk memasukkan materi PIM ✓ KBIK rutin baik ditingkat kelurahan maupun kota terkait dengan pemahaman PIM dan penyelesaian pengaduan yang masig berproses.

			masih banyak yang belum tahu soal mekanisme menyampaikan informasi dan masalah		
3.	Kualitas dokumen perencanaan teknis	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dari 5 kelurahan penerima BPM 2019 baru 2 kelurahan yang sudah ada dokumen teknisnya dan itu pun belum lengkap ✓ Masih ada titik kegiatan pengeboran sumur bor yang harus di pindah karena terlalu dekat dengan bibir pantai ✓ Gambar pradesain belum selesai dibuat ✓ Sudah ada rencana atau usulan kegiatan untuk BPM 2019 sesuai dengan numerik permasalahan yang ada di kelurahan Imbi ✓ Kelurahan Imbi dan Hamadi Mekanisme penyusunan dokumen perencanaan teknis sudah sesuai dengan POS infrastruktur ✓ Kesiapan lahan sudah diverifikasi dan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya kemampuan SDM atau pendamping dalam hal teknis penyusunan perencanaan yang baik (penyusunan DED, pra desain dan RAB) ✓ Lemahnya pengendalian tim Korkot dalam mengawal percepatan penyusunan dokumen teknis ✓ Dari 5 kelurahan BPM rencana yang akan cair tahap I baru di 2 kelurahan sesuai dengan nilai DIPA awal Kota sehingga dokumen teknis yang didahulukan baru di 2 kelurahan dari 5 kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim korkot membuat time line penyelesaian penyusunan dokumen teknis yang sudah disepakati dan ditandatangani bersama tim pendamping ✓ KBIK POS kegiatan infrastruktur ✓ Kroscek atau surve lokasi kegiatan sumur bor untuk memastikan kesiapan lahan pemindahan titik pengeboran ✓ Askot safeguar memfasilitasi tim pendamping untuk mendapatkan surat ijin pengeboran dari pemerintah setempat

			ada masalah		
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	Baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berkas pencairan ditingkat LKM khususnya untuk 2 kelurahan yang akan cair BPM tahap I sudah selesai walaupun masih ada beberapa yang perlu dilengkapi kembali ✓ Telah ditandatangani SPK LKM dengan PPK 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berkas pencairan belum selesai di verifikasi ditingkat Korkot sehingga masih ada point-point yang perlu direvisi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengendalian Korkot harus lebih di aksimalkan kembali
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kolaborasi kegiatan pada tahun 2018 dengan Pemda adalah adanya alokasi dana kegiatan infrastruktur (P3IPK) yang merupakan replikasi kegiatan KOTAKU ✓ Selain itu ada juga beberapa kegiatan CSR dengan pihak swasta ✓ Tidak semua kegiatan kolaborasi bias menyelesaikan permasalahan utama kekumuhan (7+1) indikator kumuh di delineasi ✓ Forum Kolaborasi tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang tersosialisasikannya numerik permasalahan permukiman kumuh kepada pihak CSR dan LKM ✓ Pendampingan forum kolaborasi masih hanya sebatas rapat koordinasi saja belum mengarah pada strategi dan aksinya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Korkot segera melakukan review keberadaan forum kolaborasi yang sudah terbentuk ✓ Korkot mendampingi penyusunan rencana kerja dan strategi forum kolaborasi berdasarkan profil permukiman kumuh beserta pemasalahan yang masih ada pada kelurahan deliniasi

			2019 sudah terbentuk tapi belum aktif dan belum memiliki rencana kerja yang jelas dan terkur.		
6.	Efektifitas kerja KPP	Kurang	KPP terbentuk tapi belum memiliki rencana kerja sehingga tidak berjalan dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemahaman KPP yang masih lemah ✓ Pengendalian tim pendamping masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memanfaatkan momen pelaksanaan PKM untuk meningkatkan kapasitas KPP
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	Baik	Secara umum Data SIM sudah sesuai dengan realisasi dilapangan apabila ada kegiatan yang belum ada datanya itu lebih kepada keterlambatan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan yang terlambat akan mengakibatkan keterlambatan pengentryian data SIM	Hari SIM lebih di optimalkan baik ditingkat Korkot maupun KMW

Jayapura, 5 Juni 2019

Resume kegiatan uji petik ini disusun oleh ;

Mengetahui ;

Irma Ardiani

TA. Monev OSP 11 Papua

Elfrida Mokoginta

Teamleader OSP 11 Papua